



PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Endri Parwanto, Puji Harto¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

ABSTRACT

This study aimed to analyze the effect of the audit results by BPK on the financial performance of local government in Jawa Tengah Province. The variables in this study are audit opinion, audit findings, the follow up of audit results, and timeliness in reporting financial statements. The financial performance measures are using effectiveness ratio and efficiency ratio. This study uses secondary data from audit report by Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia and financial statements of local government in Jawa Tengah Province in 2013 and 2014. The data and hypothesis are tested by using partial least square (PLS) method. The results showed that not all of the audit results by BPK have a significant effect on financial performance of local government. Audit opinion and timeliness in reporting financial statement have a significant effect on financial performance of local government, meanwhile audit findings and the follow up of audit results have no significant effect on financial performance of local government.

Keywords: audit opinion, audit findings, the follow up of audit results, timeliness in reporting financial statement, and financial performance

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah berjalan sejak 1999 memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengambil keputusan serta mempunyai kewenangan luas dalam upaya mengembangkan seluruh potensi yang dimulai dengan tujuan menyejahterakan masyarakat (Mercy, 2013). Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan otonomi daerah, berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 pasal 31 mengungkapkan bahwa pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pelaksanaan otonomi daerah diiringi tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2009). Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien.

Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif, efisien, dan akuntabel. Oleh karena itu diperlukan adanya evaluasi kinerja keuangan yang bertujuan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah ini dijadikan sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun selanjutnya. Menurut Chaw (dalam Sumarjo, 2010) pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting karena akan memberikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan. Untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

¹ Corresponding author

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD menjadi sangat penting dalam menilai akuntabilitas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh hasil pemeriksaan BPK yang berupa opini pemeriksaan, temuan pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori keagenan menggambarkan hubungan keagenan dalam bentuk kontraktual antara principal dan agent untuk melakukan pelayanan atas nama prinsipal yang melibatkan pendelegasian kewenangan pengambilan keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling, 1976). Adanya pemisahan kepemilikan oleh principal dengan pengendalian oleh agen dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara principal dan agen (Jensen dan Meckling, 1976).

Pihak eksekutif atau pemerintah sebagai agen memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, menyajikan pelaporan dan pengungkapan segala pelaksanaan pemerintahan kepada pihak prinsipal atau masyarakat (Mardiasmo, 2002). Salah satu masalah keagenan adalah adanya asimetri informasi. Dalam pemerintahan, asimetri informasi ini yang dapat menimbulkan penyimpangan atau korupsi oleh pemerintah sebagai agen. Oleh karena itu, pengelolaan pemerintahan harus diawasi untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu bentuk pengawasan ini adalah pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Opini Pemeriksaan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah

Teori agensi menyatakan bahwa akan ada konflik kepentingan antara agen dan principal, agen dalam hal ini adalah pemerintah daerah sedangkan principal adalah masyarakat yang diwakili oleh DPRD. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara, Negara sebagai prinsipal menunjuk BPK untuk memeriksa laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah, sehingga Negara dalam hal ini masyarakat sebagai prinsipal memperoleh keyakinan kebenaran atas laporan yang disusun sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu hasil pemeriksaan BPK yaitu opini pemeriksaan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat sebagai alat ukur penilaian kinerja pengelolaan keuangan negara

Opini pemeriksaan sering dijadikan sebagai pengukuran kinerja suatu daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya yang bersifat eksternal. Penelitian yang dilakukan Virgasari (2006) menyatakan bahwa opini pemeriksaan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, dimana semakin baik opini yang diperoleh pemerintah daerah maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah tersebut. Penelitian lain yang meneliti pengaruh opini terhadap kinerja pemerintah daerah juga dilakukan oleh Marfiana (2013) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara opini pemeriksaan BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Mengacu pada penelitian-penelitian tersebut dapat dirumuskan hipotesis :

H1 : Opini pemeriksaan BPK mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Temuan Pemeriksaan BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa salah satu masalah keagenana adalah asimetri informasi. Asimetri informasi adalah suatu keadaan dimana adanya informasi yang tidak transparan antara agen dan prinsipal yang dapat berindikasi pelanggaran dan korupsi. Asimetri dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat ditelusuri dari hasil pemeriksaan BPK yang tercantum dalam temuan pemeriksaan. Peraturan BPK Nomor 1 tahun 2007 tentang standar pemeriksaan keuangan Negara menyatakan bahwa temuan pemeriksaan dapat berupa kelemahan pengendalian internal, kecurangan, penyimpangan atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpotensi merugikan keuangan Negara. Dengan demikian, temuan pemeriksaan yang merupakan hasil pemeriksaan BPK dapat menjadi tolak ukur kinerja keuangan pemerintah daerah apakah pemerintah daerah telah bekerja tanpa adanya pelanggaran dan kecurangan.

Penelitian Mustikarini dan Fitriasisi (2012) menghasilkan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap skor kinerja Pemda Kabupaten/Kota di Indonesia dengan menggunakan data tahun 2007, hasil serupa juga dihasilkan oleh Sudarsana (2013) dengan menggunakan data tahun 2010. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak temuan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemerintah daerah tersebut. Sesuai dengan konsep dan hasil penelitian tersebut, maka penulis memiliki hipotesis :

H2 : Temuan pemeriksaan BPK mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara menyatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, dan pelaksanaan tindak lanjut ini akan dipantau oleh BPK. Pemerintah daerah dalam hal ini pejabat pemerintah yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, menindaklanjuti hasil pemeriksaan menjadi hal yang penting bagi pemerintah daerah. DPRD sebagai lembaga legislatif juga berhak untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK ini. Tindak lanjut hasil pemeriksaan akan sangat berpengaruh terhadap penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tri Hartono (2006) dalam penelitian menyatakan bahwa tindak lanjut temuan audit merupakan unsur penting dalam penilaian atas kinerja manajemen. Tindak lanjut pemeriksaan merupakan bentuk tanggung jawab manajemen dalam hal ini pemerintah daerah dalam menyelesaikan temuan-temuan pemeriksaan yang dilakukan BPK. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis memiliki hipotesis sebagai berikut:

H3 : Tingkat tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Keuangan Daerah pasal 297 ayat (2) dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh kepala daerah kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian pemerintah daerah sudah seharusnya mematuhi peraturan perundang-undangan ini dengan menyampaikan laporan keuangan daerah secara tepat waktu. Penulis

beranggapan bahwa masyarakat memiliki persepsi bahwa ketepatan waktu menyampaikan laporan keuangan merupakan indikator kinerja pemerintah daerah. Dari uraian tersebut, penulis memiliki hipotesis:

H4 : Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan lima variabel yang terdiri dari empat variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Rasio efektivitas diukur dengan membandingkan antara nilai realisasi pendapatan asli daerah dengan target pendapatan asli daerah, sedangkan rasio efisiensi diukur dengan membandingkan output dan input atau realisasi penerimaan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah hasil pemeriksaan BPK yakni opini pemeriksaan, temuan pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, dilengkapi dengan variabel ketepatan waktu atas penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah.

Variabel opini pemeriksaan diukur dengan skala ordinal dengan rincian WTP=5, WTP-DPP=4, WDP=3, TMP=2, TW=1. Variabel temuan pemeriksaan diukur dengan menggunakan nilai temuan yang terdapat pada laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan BPK. Variabel tindak lanjut hasil pemeriksaan diukur dengan membandingkan antara jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti dengan total temuan pemeriksaan. Sedangkan variabel ketepatan waktu diukur dengan mengurangkan waktu batas penyampaian laporan keuangan (31 maret) dengan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah.

Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki data laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan pada tahun 2013 sampai 2014. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota di Provinsi Jawa Tengah berjumlah 35 pemerintah daerah yang terdiri dari 29 pemerintah kabupaten dan 6 pemerintah kota.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sensus yaitu dimana objek penelitian adalah seluruh populasi yaitu seluruh pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten pada Provinsi Jawa Tengah. Kriteria objek penelitian yang ditentukan oleh penulis adalah seluruh pemerintah daerah yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki data laporan keuangan yang lengkap dan laporan hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2013 dan 2014.

Metode Analisis

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). Penelitian ini menggunakan metode PLS dikarenakan data yang diolah relatif kecil yaitu sebesar 35 objek dan variabel dependen diukur dengan dua indikator. PLS merupakan metode alternatif dari SEM yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hubungan diantara variabel yang kompleks namun ukuran sampel datanya kecil (30 sampai 100) (Hair et. Al. 2010). PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* (Wold dalam Ghazali, 2006) karena tidak didasarkan pada banyak asumsi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki data laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan pada tahun 2013 sampai 2014. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah baik

kabupaten maupun kota di Provinsi Jawa Tengah berjumlah 35 pemerintah daerah yang terdiri dari 29 pemerintah kabupaten dan 6 pemerintah kota. Penelitian ini menggunakan populasi sebagai objek penelitian dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1
Rincian Populasi Penelitian

Uraian	Jumlah
Pemerintah Kabupaten di Jawa Tengah	29
Pemerintah Kota di Jawa Tengah	6
Total	35

Deskripsi Variabel

Dari objek penelitian yang berjumlah 70 data, berikut hasil statistik deskriptif dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan informasi tentang karakteristik variabel-variabel yaitu opini, temuan, TLHP, ketepatan waktu, Efektivitas, dan Efisiensi. Hasil pengujian statistik deskriptif terhadap variabel-variabel tersebut dapat dilihat pada table 2.

Tabel 2
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variable Penelitian		N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Variabel Independen (Hasil Pemeriksaan BPK)	Opini	70	3.00	5.00	3.50	0.83
	Temuan	70	6.30	10.50	8.50	0.68
	TLHP	70	0.20	1.00	0.69	0.23
	Ketepatan waktu	70	-2.00	60.00	24.81	16.12
Variabel Dependen (Kinerja Keuangan)	Efektivitas	70	1.04	1.86	1.38	0.21
	Efisiensi	70	0.82	1.16	0.94	0.05

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan pengujian atas model pengukuran (*outer model*), model pengukuran memiliki nilai *loading factor* diatas 0,5, dan memiliki nilai AVE lebih dari 0,5 serta nilai *composite reliability* lebih dari 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa model pengukuran memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai. Sedangkan hasil pengujian hipotesis (*inner model*) dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Hasil Pengujian Model Struktural atau Inner Model

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics ((O/STERR))
Opini -> Kinerja Keuangan	0.2756	0.2713	0.1202	0.1202	2.2922
Temuan -> Kinerja Keuangan	0.1672	0.1393	0.1132	0.1132	1.4775
TLHP -> Kinerja Keuangan	-0.0441	-0.0148	0.1766	0.1766	0.2498
Disiplin LK -> Kinerja Keuangan	0.2406	0.261	0.1138	0.1138	2.1149

Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini adalah opini pemeriksaan BPK memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian *inner model* pada tabel 4.7 variabel opini memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,2756 dengan nilai t statistic sebesar 2,2922, nilai tersebut lebih besar dibanding nilai t tabel (1,96), sehingga dapat disimpulkan bahwa **hipotesis pertama (H1) diterima**. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel opini pemeriksaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Salah satu masalah keagenan yaitu asimetri dapat diatasi dengan adanya pemberian opini oleh BPK terhadap laporan keuangan. Opini pemeriksaan menggambarkan sejauh mana pemerintah dapat mengelola keuangan daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan kontrak yang berlaku antara pemerintah daerah dan DPR sebagai perwakilan masyarakat.

Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini adalah temuan pemeriksaan memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian *inner model* pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa variabel temuan memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,1617 dengan nilai t statistic sebesar 1,4775, nilai tersebut lebih kecil dari t tabel (1,96), dengan demikian **hipotesis kedua (H2) ditolak**. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa temuan pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Nurdin (2012) yang menyimpulkan bahwa nilai temuan suatu pemerintah daerah yang kecil tidak dapat memberi kepastian bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut bernilai baik.

Hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian *inner model* pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa variabel TLHP memiliki nilai koefisien jalur sebesar -0,0441 dengan nilai t statistic sebesar 0,2498, nilai tersebut lebih kecil dibanding nilai t tabel (1,96), dengan demikian **hipotesis ketiga (H3) ditolak**. Hal ini menunjukkan bahwa variabel TLHP tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Maryani (2015) berpendapat bahwa informasi tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak menjadi patokan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.

Hipotesis keempat (H4) adalah ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian *inner model* pada tabel 4.7 terlihat bahwa variabel disiplin LK memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,2406 dengan nilai t statistic sebesar 2,1149 dimana nilai tersebut lebih besar dari t tabel (1,96), dengan demikian bahwa



hipotesis keempat (H4) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel disiplin LK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Masyarakat mempunyai persepsi bahwa pemerintah daerah yang disiplin menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu mencerminkan ketaatan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menggambarkan komitmen pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik guna mencapai kinerja yang maksimal.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua hasil pemeriksaan BPK memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Opini pemeriksaan dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini mengkonfirmasi teori keagenan yang menyatakan bahwa agen dalam hal ini pemerintah daerah yang diberikan wewenang untuk mengelola pemerintahan yang diamanatkan oleh masyarakat sebagai prinsipal, masyarakat mengharapkan pemerintah sebagai agen untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan temuan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, ini menunjukkan bahwa nilai temuan yang rendah dan tingkat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang rendah tidak dapat menggambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah tersebut rendah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. *Pertama*, Objek penelitian hanya sebatas pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah yang yakni sebanyak 35 pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota. Sehingga penelitian ini belum bisa menggambarkan secara menyeluruh kinerja keuangan di Indonesia. *Kedua*, Dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, peneliti hanya menggunakan dua rasio yaitu rasio efektivitas dan rasio efisiensi. *Ketiga*, Masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian sehingga masih banyak ruang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Atas dasar keterbatasan tersebut, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar menambahkan rasio-rasio keuangan lainnya dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dan menambah variabel –variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

REFERENSI

- Bernstein, J David. (2000). *Local government measurement use to focus on performance and results. Evaluation and Program Planning* 24 (2001) 95-101. USA
- Chin, W.W. 1998. *Partial Least Square Approach For Structural Equation Modeling. In Marcoulides, G.A. Modern Method for Business Research. Mahwah. Nj. Erlbaum*
- DeAngelo, L. E. 1981. *Auditor Size and Audit Quality. Journal of Accounting and Economics* 3 (1): 167-175
- Eisenhardt, Kathleem. M. 1989. *Agency Theory: An Assesment and Review. Academy of management Review. Vol. 4. Hal 57-74.*
- Ghozali, Imam. 2006. *Structural Equation Modeling: Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.



- Ghozali, Imam dan Hengki Latan. 2012. Partial Least Square “Konsep, Metode dan Aplikasi” menggunakan program WarpPLS 2.0. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono, Tri. 2006. Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit Sebagai Unsur Penilaian Kinerja Manajemen Kantor Cabang. Tesis. Universitas Diponegoro
- Lane, Jan-Erik. 2000. *The Public Sector – Concepts, Models and Approaches*. London: SAGE Publications.
- Mahmudi, 2006. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP YPKN
- Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta :BFFE
- Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Mustikarini, Widya Astuti dan Fitriyani, Debby. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. Vol. 9. No. 3, 421-436
- Nurdin, Fandy. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK RI terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Universitas Brawijaya Vol 3 No. 1.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Keuangan Daerah
- Pramono, Joko. 2014. Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). Among Makarti, Vol.7 No.13, 150 - 165
- Sekaran, U. 2011. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach 4th Ed.* Jakarta: Salemba Empat
- Siregar, Silky Raditya. 2012. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Opini Auditor Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Accounting Analysis Journal, [S.L.], V. 1, N. 2, Dec. 2012. Issn 2252-6765
- Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Sebelas Maret
- Suoth, Mercy Pricilia. 2012. Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bitung. Skripsi. Jurnal Emba Vol. 1 No. 3, 1203-1211.



Syamsi, Ibnu. 1986. Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional. Jakarta: CV Rajawali

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sekretariat Negara. Jakarta.

Virgasari, Aviva. 2009. Hubungan Antara Opini Auditor pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah(PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Kinerja Keuangan Daerah. Skripsi. Universitas Brawijaya Malang

Wold, H. 1985. *Partial Least Squares*. In S Kotz & N.L. Johnson (Eds). *Encyclopedia Of Statistical Science*. Vol. 8. New York : Wiley.

Yamin, S. dan Kurniawan, H., 2009, *Structural Equation Modeling: Belajar Lebih Mudah Teknik Analisis Data Kuesioner dengan LISRES-PLS*, Buku Seri Kedua, Jakarta: Salemba Infotek.